

OGI MENYELENGGARAKAN SIDE EVENT DALAM G20 DWG KE-3



Bali - (9/8) – Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) menyelenggarakan sebuah *Side Event* sebagai bagian dari rangkaian 3rd G20 Development Working Group (DWG) Meeting. Side Event ini mengangkat tema "*Mainstreaming Open Government Values in Governance and Sustainable Development*" dan dilangsungkan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, dengan mengundang pembicara dari berbagai latar belakang.

Pembicara yang diundang antara lain Bapak Slamet Soedarsono (Plt. Deputy Politik Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas), Bapak Aidan Eyakuze (Direktur Eksekutif Twaweza Afrika Timur), Ibu Dwi Kartianingsih (Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP), Bapak Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang), Bapak Nicholas Booth (*Officer in Charge for UNDP Indonesia*),

Bali - (9/8) – The Open Government Indonesia National Secretariat (OGI) hosted a Side Event as part of the 3rd G20 Development Working Group (DWG) Meeting. This Side Event raised the theme "*Mainstreaming Open Government Values in Governance and Sustainable Development*" and was held in Bali Nusa Dua Convention Center at Nusa Dua, Bali, with speakers from various backgrounds.

The panel of speakers comprised of Mr. Slamet Soedarsono (Act. Deputy Minister for Politics, Law, Security and Defense at the Ministry of National Development Planning/Bappenas), Mr. Aidan Eyakuze (Executive Director of Twaweza East Africa), Ms. Dwi Kartianingsih (Director of Business Climate Development and International Cooperation at LKPP), Mr. Hendrar Prihadi (Mayor of Semarang), Mr. Nicholas Booth (Officer in Charge for UNDP Indonesia),

Bapak Rolando U. Toledo (*Under-Secretary for the Department of Budget and Management* Filipina), Ibu Shita Laksmi (Direktur Eksekutif Yayasan TIFA), dan Bapak Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID).

Pandemi COVID-19 telah menghambat pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara global, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, sebesar 18% dari 289 indikator TPB mengalami penurunan pencapaian yang signifikan. Dalam menyikapi kondisi tersebut, dibutuhkan langkah strategis dari seluruh aktor pembangunan seperti pemerintah, akademisi, filantropi, masyarakat sipil, dan bisnis agar pencapaian TPB dapat dilakukan tepat waktu. Salah satu langkah strategis tersebut yang penting dijalankan adalah pengarusutamaan nilai-nilai keterbukaan pemerintah, antara lain transparansi, partisipasi, inovasi, inklusi, dan akuntabilitas.

Praktik keterbukaan pemerintah telah diinstitutionalisasi melalui platform *Open Government Partnership* (OGP) di mana Indonesia menjadi negara anggota, dan komitmen-komitmen yang dijalankan negara anggota di bawah platform tersebut telah membawa dampak nyata terhadap pengembangan pada beragam belahan dunia. Sebagai contoh, menurut praktik baik dari salah satu anggota OGP Local, Kota Semarang, transparansi dan partisipasi publik telah secara langsung mempengaruhi peningkatan akses edukasi dan infrastruktur lebih baik. Pada *Side Event*, praktik baik lainnya (contoh: di Tanzania) juga telah dibagikan.

Side Event ini memiliki dua tujuan, antara lain:

- 1) Memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik terkait nilai dan praktik pemerintahan terbuka dalam konteks pembangunan berkelanjutan; dan
2. Mengidentifikasi tantangan dan perbaikan strategis praktik pemerintahan terbuka dalam membina kemitraan yang lebih kuat, lebih berjejaring, dan inklusif dalam pencapaian SDGs.

Mr. Rolando U. Toledo (Under-Secretary for the Department of Budget and Management, Philippines), Ms. Shita Laksmi (Executive Director of TIFA Foundation), and Mr. Sugeng Bahagijo (Executive Director of INFID).

The COVID-19 pandemic has hampered the achievements of the Sustainable Development Goals (SDGs) on a global scale, including in Indonesia. In Indonesia itself, 18% out of the 289 SDGs indicators underwent a significant decrease in their achievement. In addressing those conditions, strategic actions are required from all development actors such as the government, academia, philanthropists, civil society, and businesses in order to achieve the SDGs in time. A part of those strategic actions should include the mainstreaming of open government values, namely transparency, participation, innovation, inclusion, and accountability.

Open government practices have been institutionalized through the Open Government Partnership (OGP) platform in which Indonesia is a member, and the commitments that have been carried out by country members through the OGP have brought real changes towards development across different parts of the world. As an example, according to best practices from Semarang City, a member of OGP Local, transparency and public participation have directly led to increased access to education and improved infrastructures. In the Side Event, other best practices (e.g., in Tanzania) were shared as well.

The Side Event was held with two objectives:

- 1) To facilitate the exchange of knowledge, experiences, as well as best practices regarding open government values and practices in the context of sustainable development; and
- 2) To identify challenges and strategic improvements on open government practices in fostering stronger, more networked, and inclusive partnerships in the achievement of SDGs.

Dari diskusi yang lahir dari *Side Event* ini, ada beberapa kesimpulan kunci. Pertama, keterbukaan pemerintah perlu diupayakan tidak hanya oleh pihak pemerintah, tetapi juga unsur non-pemerintah. Seperti yang disampaikan Bapak Aidan Eyakuze, masyarakat perlu bersikap proaktif dan proposisional, dan pemerintah perlu terus menjamin ruang yang aman dan bermakna bagi masyarakat untuk terlibat. Kedua, Bapak Nicholas Booth juga berpesan bahwa inklusi dan transparansi perlu ditingkatkan untuk adanya pembangunan berkelanjutan yang bermakna, dan melibatkan masyarakat lebih luas termasuk komunitas akar rumput dan pemuda. Ibu Dwi Kartianingsih mengingatkan bahwa profesionalitas dan keadilan adalah sesuatu yang harus berjalan dengan berdampingan.

Ketiga, Ibu Shita Laksmi berpesan bahwa keterbukaan pemerintah bukan sebuah tujuan, melainkan sebuah cara untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memprioritaskan masyarakat. Berkaitan dengan ini, Bapak Rolando Toledo menyampaikan bahwa pemerintah dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik ketika menanggapi tuntutan warga negara dan sektor swasta untuk meningkatkan transparansi, integritas, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan. Bapak Hendrar Prihadi juga telah menyatakan dan membuktikan dengan praktik baik di Kota Semarang bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut membuat masyarakat lebih percaya dengan pemerintah dan mau ikut terlibat untuk membuat kotanya lebih baik. Dari perwakilan masyarakat sipil, Bapak Sugeng Bahagijo juga memberi masukan bahwa pemerintah harus memiliki kegiatan kerja yang sesuai keadaan warga dan membuka data terhadap pelaksanaan serta hasil kerjanya.

From the discussion that was born through the Side Event, there are some key takeaways. Firstly, open governance is something that both government and non-government actors need to push for. As Mr. Aidan Eyakuze delivered in the session, civil society need to be "pushy" and propositional, while the government needs to continue to ensure a safe and meaningful space for the people to be involved. Secondly, Mr. Nicholas Booth also mentioned that inclusion and transparency need to be increased for a meaningful sustainable development to exist, and involve a wider scope of citizens such as grassroots organizations and youth. Ms. Dwi Kartianingsih also reminded that professionalism and justice are things that have to go hand in hand.

Thirdly, Ms. Shita Laksmi remarked that open governance is not an end in itself, but rather a modality through which we ensure the development we do must have the people at its center. In relation to that, Mr. Rolando Toledo concluded that the government can restore the trust of its citizens towards public institutions when they listen to the demands of citizens and the private sector to increase transparency, integrity, accountability, and the participation of relevant stakeholders. Mr. Hendrar Prihadi also declared and demonstrated in Semarang City that through the implementation of those principles, citizens are more trusting towards the government and are more willing to contribute to the betterment of their city. As a representative from the civil society, Mr. Sugeng Bahagijo also suggested the government to implement a work plan based on the conditions and needs of the people and open the data about the implementation and results.